
MENULIS ULANG PERSETERUAN ISLAM DAN KOMUNISME DI AFGANISTAN

Ratna Endang Widuatie, Dewi Salindri, Sri Ana Handayani, Nur Rosyidah

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

ratnaendangw@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas dampak perseteruan dua kekuatan politik di Afganistan, yaitu faksi Islam dan faksi komunis sejak 1960-an hingga 2000-an. Perubahan penting dalam sejarah Afganistan terjadi ketika intervensi militer Uni Soviet berakhir dan kelompok Islam memegang kendali. Namun perubahan selanjutnya terjadi ketika invasi Amerika Serikat yang mengerdilkan Islam dalam agenda politik negara yang akhirnya memicu perebutan kekuasaan oleh Taliban. Kajian-kajian terdahulu tentang Afganistan memberikan gambaran tentang pola-pola perubahan dan kekuasaan yang terjadi di Afganistan. Narasi yang berkembang tentang Afganistan khususnya ketika kelompok Taliban berkuasa membuka peluang terhadap wacana baru dalam melihat hubungan Islam dan kekuatan politik sekuler, khususnya komunis di negara Asia Tengah ini. Artikel ini disusun menggunakan metode sejarah untuk mendapatkan penjelasan atas dinamika politik Afganistan pada paruh kedua abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Pendekatan ilmu politik sebagai *auxiliary tool* membantu memahami beberapa gejala yang khas dalam kasus Afganistan antara lain relasi Islam dan komunisme, pandangan internasional baik Barat maupun dunia Islam terhadap Afganistan modern, serta signifikansi penulisan ulang sejarah Afganistan khususnya dalam studi konflik. Topik-topik tersebut menjadi kunci untuk menempatkan Afganistan dalam pembahasan sejarah dan geopolitik kawasan yang saling terkait.

Kata kunci: Afganistan; Islam; komunisme; politik; Taliban.

HISTORIOGRAPHY REWRITING OF THE CLASH OF ISLAM AND COMMUNISM IN AFGANISTAN

Abstract

This article discusses the impact of the clash of two political forces in Afghanistan, the Islamic faction and the communist faction, from the 1960s to the 2000s. An important change in Afghanistan's history occurred when the Soviet Union's military intervention ended and Islamic groups took control. However, the next change occurred when the United States invaded, which dwarfed Islam in the country's political agenda, which ultimately triggered the seizure of power by the Taliban. Previous studies on Afghanistan provide an overview of the patterns of change and power that occurred in Afghanistan. The narrative that developed about Afghanistan, especially when the Taliban group came to power, opened up opportunities for new discourses in looking at the relationship between Islam and secular political forces, especially communist in this Central Asian country. This article was prepared using historical method to obtain an explanation of the political dynamics of Afghanistan in the second half of the 20th century to the beginning of the 21st century. The political science approach as an auxiliary tool helps to understand several unique symptoms in the case of Afghanistan, including the relationship between Islam and communism, the international views of both the West and the Islamic world towards modern Afghanistan, and the significance of rewriting Afghan history, especially in conflict studies. These topics are key to placing Afghanistan in the interrelated discussion of regional history and geopolitics.

Keywords: *Afganistan; communism; Islam; politic; Taliban.*

Naskah masuk : 30-08-2023; Revisi akhir : 24-10-2023; Disetujui terbit : 15-11-2023

I. PENDAHULUAN

Tocqueville, Burckhardt, Huizinga dan Braudel menyatakan hanya para ahli historiografi modern terkenal, yang berani mengafirmasikan menolak narasi dalam karya historiografi tertentu, mereka mungkin memiliki asumsi makna peristiwa yang ingin mereka tangani, sehingga ada ketidakcocokan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dekonstruksi menjadi representasi dalam mode naratif untuk melawan narasi-narasi sejarah yang telah ada (White, 1980). Sejarah adalah bentuk kegiatan dari politik masa lampau (Kartodirdjo, 2017) sehingga memberikan arti tersendiri bagi masa lampau terhadap berbagai peristiwa yang menjadi ingatan kolektif (Ankersmit, 1987). Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau adalah bentuk kesadaran sejarah yang berjalan dalam sebuah pola tertentu, atau menurut perspektif filsafat aliran positivistik bahwa sejarah akan selalu bergerak maju dan menemukan titik akhirnya. Revolusi sangat identik dengan adanya sebuah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya desakan-desakan atau tekanan yang diberikan oleh kekuatan politik yang hegemonik, menimbulkan keadaan yang lambat laun akan mengalami kejenuhan di dalam praktik keberlangsungannya.

Pasca berakhirnya perang Dunia II, muncul dua kekuatan besar dunia yang merupakan bentuk “pembelahan politik” secara global yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pembelahan tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap negara-negara di seluruh dunia. Usaha negara-negara berkembang untuk mencari dukungan dari berbagai pihak menjadikan perseteruan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi pola konflik yang khas bahkan hingga tingkat regional, seperti dalam kasus Perang Vietnam. Kondisi ini di lain pihak juga dimanfaatkan kedua negara yang dijuluki sebagai *superpower* atau adidaya untuk mengembangkan propaganda politik yang akhirnya memunculkan dua kubu atau *bloc* yaitu *Eastern Bloc* (Blok Timur yang merupakan kekuatan pendukung Uni Soviet) dan *Western Bloc* (Blok Barat yang diisi Amerika Serikat dan sekutu politik-militernya di Eropa). Kontestasi kedua blok kemudian melahirkan istilah *Cold War* atau Perang Dingin yang menjadi sebuah wacana menarik di dalam perkembangan narasi sejarah secara global, terutama untuk para orientalis yang memiliki fokus terhadap pengembangan studi tentang Asia.

Perang Dingin bukanlah sekedar konflik bersenjata seperti halnya perang pada umumnya, tetapi lebih dari itu. Konflik ini adalah persaingan politik yang berimplikasi pada bidang-bidang strategis lain seperti ekonomi, pertahanan, intelijen, dan tentu saja perkembangan teknologi yang mengarah pada perlombaan senjata (*arm races*) yang mengkhawatirkan bagi cita-cita perdamaian global. Perang Dingin adalah sebuah peristiwa yang memiliki dampak lebih tinggi dibandingkan dengan perang dunia, sehingga dampak Perang Dingin adalah pembentukan ideologi negara dan perubahan aturan atau sistem pemerintahannya yang menegaskan dua pilihan yaitu liberalisme-kapitalisme atau sosialis-komunisme. Perseteruan kekuatan politik dalam Perang Dingin akhirnya memberikan kerawanan bagi negara-negara yang sebelumnya menjadikan Islam sebagai identitas politiknya seperti Turki, Iran, dan Afganistan.

Afganistan adalah salah satu negara yang menjadi tempat pertemuan antara Barat dan Timur pada masa Perang Dingin, sehingga percaturan politik yang terjadi di dalamnya sangat kompleks, ditambah dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Afganistan banyak terpecah menjadi beberapa golongan seperti Mujahidin dan Taliban. Uni Soviet menyadari bahwa kuatnya dominasi Barat yang berhasil membuat propaganda untuk menyerukan pembebasan adalah salah satu bentuk yang harus diantisipasi. Terlebih militansi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok pembaharu di Afganistan mendapatkan pengaruh langsung dari kedua blok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini di satu pihak menguntungkan karena menjadikan Afganistan memiliki akses persentuhan dengan budaya dan modernisasi, namun di pihak lain menjadikan negara ini sebagai ajang persewaan kedua kubu yang bersaing dalam Perang Dingin.

Terbelahnya Afganistan menjadi dua kubu ideologi adalah salah satu bentuk dampak dari Perang Dingin yang dirasakan langsung. Sejak 1960-an tampak bahwa dominasi Uni Soviet yang cukup besar di dalamnya menjadikan berbagai problematik di antara garis perkembangan politik umat Islam di Afganistan. Seiring perkembangannya, Afganistan mulai menunjukkan representasinya di dalam arah politik yang memiliki poros berbeda, yaitu pertarungan antara Islam yang diperkuat oleh kekuatan kapitalisme untuk melawan komunisme. Komunisme sejatinya tidak diterima di Afganistan, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam (Halimi, et.al., 2022). Namun di pihak lain, dukungan ekonomi dan kerja sama pertahanan dengan Uni Soviet menjadi daya tawar yang kuat.

Meskipun secara politik Afganistan harus menjadi *buffer zone* bagi kepentingan Uni Soviet, namun mereka masih mendapatkan merit dari hubungan ini. Namun demikian, akhirnya kalangan berpengaruh di Afganistan menjadi penganut komunisme yang ditandai dengan munculnya partai komunis *People's Democratic Party of Afganistan* (PDPA) pada 1 Januari 1965 yang diketuai Nur Mohammad Taraki. Perbedaan pandangan perjuangan membuat PDPA pecah menjadi dua faksi pada 1967 yaitu faksi Khalq dan faksi Parcham. Faksi Khalq pimpinan Taraki lebih radikal dan menganut asas nonkooperasi, sedangkan faksi Parcham dipimpin Babrak Karmal menganut asas perjuangan kolaboratif. Oposisi komunis yaitu kelompok cendekiawan muslim juga turut mendirikan partai sebagai reaksi atas berkembangnya komunisme. Pada tahun 1969 berdiri Juwan Muslim yang berisi kaum pelajar, pemuda, dan mahasiswa muslim.

Persaingan antarfaksi politik di Afganistan makin meruncing ketika pada 1973 Daoud Khan melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan monarki Zahir Shah. Tatanan baru Afganistan pasca monarki sempat membaik pada awalnya, namun hubungan Daoud Khan dengan Moskow memburuk ketika Daoud Khan berusaha membersihkan anasir komunis dari pemerintahannya. Pada saat bersamaan, Daoud Khan melakukan lobi politik mendekati Barat maupun negara-negara kaya di Timur Tengah untuk mendapat dukungan ekonomi. Singkatnya, Daoud Khan mendekati rival Uni Soviet dan di dalam negeri dia berupaya menekan gerakan komunis. Pada 1978 sebuah skandal terjadi ketika kader komunis Mir Akbar Khyber tewas dan diduga atas tindakan agen rahasia Daoud Khan. Aksi protes

meluas dan ditanggapi dengan penangkapan para aktivis kiri, yang makin memicu gerakan reaksioner di Kabul.

Perseteruan antara Islam dengan komunisme di Afganistan merupakan sebuah fenomena yang berbeda di tengah kemelut Perang Dingin. Secara global, banyak negara-negara yang mengedepankan atau menjadi pendukung di antara dua ideologi tersebut. Akan tetapi, Afganistan tampil sebagai negara yang menampilkan kekuatan Islam sebagai legal-formal, sehingga atas dasar itulah yang membuat peluang bagi Amerika Serikat sebagai negara oposisi bagi Uni Soviet. Menjelang tahun 1990-an, Blok Timur pecah akibat tidak sinkronisnya dalam menyelesaikan konflik antara Kamboja dengan Vietnam, sehingga Tiongkok dan Uni Soviet menjadi dua matahari yang saling berseberangan di dalam Blok Timur. Tentu saja, perpecahan di dalam tubuh Blok Timur menandakan akhir dari hegemoni komunisme di dunia. Francis Fukuyama menjelaskan di dalam karyanya bahwa berakhirnya Perang Dingin merupakan peristiwa *the End of History*.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis meneliti tentang perseteruan antara Islam dan komunisme di Afganistan. Penulisan ulang ini merupakan sebuah strategi dekonstruksi yang sebenarnya untuk memahami sebuah peristiwa sejarah dari sisi yang berbeda. Dalam perspektif sejarahnya, Islam dan komunisme sebenarnya memiliki titik temu yang sama sebagai sebuah prinsip nilai untuk memperjuangkan kesetaraan manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Secara multidimensi, Afganistan yang didominasi oleh umat Islam tentunya sangat memegang teguh nilai-nilai Islam secara *kaffah* atau totaliter, tetapi karena adanya peristiwa politik yang membelah dunia menjadi dua kubu menjadikan kehidupan beragama di Afganistan terpengaruh. Melemahnya pengaruh komunisme memberi kesempatan pada Afganistan mengubah arah politiknya menjadi negara yang memihak kepada Barat dan menjadikan Islam sebagai ideologi negara.

Pembahasan tentang Afganistan di era kontemporer ini telah diulas dan diteliti oleh beberapa sejarawan seperti Abdullah Azzam berjudul “Perang Afganistan”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa fenomena perang yang terjadi di Afganistan merupakan sebuah upaya untuk mendeklarasikan Afganistan sebagai kekuatan politik Islam harus menguasai negara, sehingga beberapa kelompok yang bertentangan dengan pemerintahan sah di Afganistan mengambil sikap sebagai oposisi. Karya ini menggunakan perspektif Islam, sehingga mengunggulkan satu pihak atau bagian Islam itu sendiri di dalam penulisannya (Azzam, 1986).

Karya kedua dari tulisan Shahab berjudul “Perang Afganistan: Ekspansi Rusia ke Asia-Pasifik”. Buku ini menjelaskan tentang ekspansi Rusia atau Uni Soviet ke beberapa negara di Asia yang menjadi tujuan untuk mengembangkan ideologi komunisme. Afganistan adalah salah satu negara yang menjadi tempat pengembangan komunisme di kawasan Asia Tengah yang menarasikan penyingkiran pengaruh Barat di dalam hegemoni politiknya (Shahab, 1987). Karya ketiga berasal dari Yon Machmudi berjudul “Era Baru Afganistan: Invasi Barat hingga Kemenangan Taliban”. Tulisan Machmudi menjelaskan mengenai pengambilalihan kekuasaan politik sebuah negara melalui revolusi di Afganistan yang akhirnya mengubah sistem pemerintahan Afganistan menjadi pemerintahan yang Islami di dalam perwujudan reformasinya (Machmudi, 2021).

Beberapa karya di atas menjadi sebuah rujukan penting bagi penulis untuk lebih mengembangkan kajian tentang studi kawasan yang banyak mendapat perhatian di negara-negara Barat. Selain itu, ketiga tinjauan tersebut menjadi penting bagi penulis untuk melihat dari aspek berbeda yaitu sebagai kritik atas narasi historiografi yang telah ada dan berkembang dewasa ini. Dekonstruksi berulang kali menjadi sasaran terhadap bahaya post-modernisme, post-strukturalisme, atau pergantian linguistik. Sangat sedikit sejarawan yang secara aktif menggunakan dekonstruksi sebagai metodologi sejarah. Namun, beberapa sejarawan telah menggunakan metode dekonstruksi, dan dengan memeriksa karya mereka serta sasaran terhadapnya, esai ini mencoba menjelaskan alasan historiografi di balik sasaran tersebut (Kleinberg, 2007).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dari pembahasan penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut: 1. Bagaimana relasi Islam dan komunisme dalam perspektif sejarah? 2. Bagaimana perkembangan narasi sejarah Afganistan? 3. Apa urgensi pentingnya penulisan ulang sejarah Afganistan? Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut secara umum adalah untuk menempatkan dekonstruksi sebagai fokus utama dalam penulisan ulang atau historiografi tentang sejarah Afganistan.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai upaya untuk merekonstruksi peristiwa atau perkembangan narasi sejarah. Metode sejarah merupakan cara yang dilakukan oleh sejarawan untuk menghasilkan sebuah tulisan sejarah yang kredibel, kritis, dan menemukan fakta baru di dalam penelitian tersebut, sehingga untuk penggunaan metode sejarah, penulis merujuk pada pendapat Kuntowijoyo yang membaginya menjadi empat bagian yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003:69). Ini merupakan sebuah kajian historiografi, sehingga sumber yang digunakan oleh penulis berupa sumber sekunder atau karya ilmiah terdahulu dari para penulis yang melakukan penelitian tentang Afganistan. Selain itu, kajian ini termasuk dalam tema dari sejarah politik yang menekankan pada aspek kekuasaan dan kebijakan.

II. PEMBAHASAN

A. Relasi Islam dan Komunisme dalam Perspektif Sejarah

Dalam memahami permasalahan narasi yang berkembang mengenai relasi Islam dan komunisme, memerlukan beberapa penelitian terdahulu untuk mempermudah dalam memahami konteks permasalahan yang terjadi dewasa ini. Dalam lintasan sejarah, sebenarnya prinsip yang dikembangkan antara Islam dengan komunisme hampir dikatakan sama, yaitu adanya keinginan untuk memperjuangkan kesetaraan kedudukan manusia atau tanpa memandang perbedaan kelas sosial, ekonomi maupun politik. Terlepas dari konteks tersebut, pengaruh Islam yang begitu meluas di berbagai penjuru dunia telah menyadarkan betapa pentingnya relasi Islam yang menyatu dengan berbagai ideologi dunia, termasuk dengan komunisme. Pergeseran Islam sebagai kekuatan legal-formal dimulai sejak berakhirnya era khalifah Ali bin Abi Thalib yang digantikan dengan kerajaan atau Dinasti Umayyah sampai Utsman.

Pergeseran pola politik yang berawal dari masyarakat demokrasi di Madinah menjadi *mamlakat* atau monarki atau kerajaan adalah sebuah realitas sejarah yang terlegitimasi oleh adanya fakta politik yang terbentuk secara berkelanjutan, sehingga menjadi ciri khas yang sulit untuk diubah dalam ingatan masa lampau. Permasalahan tersebut tentunya sangat menggeneralisasi istilah kerajaan Islam sebagai pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Islam atau penerapan hukum Islam di suatu negara menjadi hal kewajiban yang sangat dogmatis dalam pemahaman keislaman. Fenomena tersebut yang akhirnya membawa Islam ke dalam pengerdilan sebagai agama oleh sebagian golongan yang memperjuangkan kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama (Formichi, 2015).

Apabila dikembangkan lebih jauh lagi, komunisme yang berkembang pesat di Uni Soviet tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi, narasi yang berkembang adalah meminggirkan komunisme sebagai ideologi yang terlarang, sehingga pemikiran-pemikiran yang seharusnya dapat lebih memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan justru gagal karena adanya fakta politik yang membelokkan adanya realitas sejarah yang sesungguhnya tidak menjelaskan hal tersebut (Lewis, 1954). Perseteruan Islam dan komunisme bukanlah hal yang baru, tetapi momentum Perang Dingin adalah kesempatan untuk menghantam komunisme sebagai lawan dari kapitalisme dengan cara merangkul bagian dari Islam itu sendiri.

Komunisme dan sosialisme memang lahir dari akar pemikiran yang sama. Meski demikian, Islam dengan ideologi tersebut kerap sejalan, hal ini terlihat dari perjuangan nilai-nilai Islam dalam meninggikan derajat manusia (Lewis, 1954:3), khususnya perempuan yang kerap menjadi objek dari kedigdayaan laki-laki. Hal sejalan juga terlihat bagaimana komunisme itu diciptakan dari fase Revolusi Industri yang berkembang di Inggris. Akar sejarah yang cukup kuat, baik Islam, komunisme, maupun sosialisme adalah napas perjuangan dalam mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Hal ini tentu saja menjadi ancaman besar bagi kalangan kapitalisme yang memiliki fokus terhadap pengembangan ekonomi dan keuntungannya. Kesulitan-kesulitan yang terjadi pasca Perang Dunia II menyebabkan munculnya dua kekuatan antara Barat dan Timur atau yang lebih familier dengan Komunis dan Kapitalis yang berujung pada Perang Dingin (Jacobs, 2006).

Dalam kasus Afganistan, invasi Uni Soviet pada 1979 menjadi awal sikap antipati masyarakat Afganistan terhadap komunisme. Dalam laporan yang dirilis Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA, ditemukan beberapa fenomena bahwa pendudukan Soviet yang diikuti propaganda melalui media massa gagal membentuk opini publik. Masyarakat Afganistan cenderung melihat kehadiran Tentara Merah sebagai upaya “*sovietization*” yang dikhawatirkan akan menindas kehidupan beragama mereka. Memang upaya “mengkomuniskan” Afganistan dilakukan dengan masif oleh tentara pendudukan Soviet, diantaranya dengan pembaruan kurikulum yang memperkenalkan konsep politik dan ekonomi marxisme. Namun usaha ini dinilai hanya berhasil di kota-kota besar. Akses pendidikan yang tidak merata membuat upaya pembentukan Afganistan menurut kehendak Moskow gagal (NESA Analys, 1984). Selain itu, masyarakat yang kuat dengan nilai-nilai Islamnya cenderung menunda atau tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah karena khawatir akan terpapar komunisme.

B. Perkembangan Narasi Sejarah Afganistan

Perkembangan historiografi tentang Afganistan atau narasi sejarah yang banyak diteliti oleh para sejarawan maupun kaum orientalis, sangat menonjolkan aspek Islam sebagai legalitas sejarah yang berkembang, sehingga sebagai pemenang, Islam menjadi ideologi negara yang sah. Hasilnya adalah terlihat ketidakmampuan para politisi Islam di Afganistan untuk melawan atau mengimbangi kemampuan Barat yang menjadi pemenang tunggal dari Perang Dingin. Corak penulisan yang banyak didominasi oleh Barat dan Islam itu sendiri tentu sangat memengaruhi jejak perkembangan narasi sejarah yang hadir. Seperti halnya Muhammad Abdul Quddus yang melihat adanya dinamika politik di Afganistan dari satu sisi. Ia merupakan seorang wartawan yang hadir pada zamannya, sehingga ia memberikan pernyataannya tentang kondisi di Afganistan yang hancur akibat adanya invasi Uni Soviet (Quddus, 1991).

Padahal jauh sebelum Mujahidin muncul sebagai kelompok oposan, Uni Soviet telah mendeklarasikan berdirinya pemerintahan di Afganistan yang memiliki kedekatan dengan ideologi komunis pada tahun 1980-an (Gompert, 2014). Sejalan dengan pendapat David Gompert, Raimo Väyryren (1980) menjelaskan bahwa pada April 1978 terjadi perubahan politik di Afganistan yang lebih mengedepankan persamaan dalam bidang sosial, sehingga para kelompok tani di berbagai pedesaan di Afganistan merasakan adanya keadilan yang merata dan juga persamaan dalam derajat kemanusiaan. Lebih jauh lagi, dia menarasikan bahwa selama kuasa Uni Soviet di Afganistan, adanya kebebasan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, sehingga persoalan tanah berhasil ditekan sampai tingkat 60% (95-96).

Bagaimanapun juga, invasi Uni Soviet terhadap Afganistan pada 24-27 Desember 1979 memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial-politik dan tentunya keagamaan di negara ini. Secara militer, invasi Uni Soviet menggabungkan daya gempur pasukan infanteri bermotor yang didukung angkatan udara yang tangguh. Dari segi kewaspadaan politis, invasi Uni Soviet ke Afganistan antara lain dilatarbelakangi menguatnya kekuatan Islam fundamentalis yang diyakini oleh Soviet akan membahayakan legitimasi pemerintahan Moskow. Menguatnya kekuatan Islam fundamentalis di Asia Tengah dan Trans-Kaukasian juga akan melemahkan Blok Timur, sehingga motivasi invasi ke Afganistan merupakan bentuk dari rivalitas Islam dan Komunisme secara umum (Khan, 1990).

Meskipun narasi yang berkembang menyatakan terdapat keberhasilan penyamarataan keadilan sosial di Afganistan yang berideologi komunis, tetapi Liakhovsky seorang sejarawan militer di Rusia menjelaskan terkait dengan adanya ketidakmampuan pemerintahan komunis yang dijalankan di Afganistan dalam meraup dukungan, khususnya di beberapa daerah yang memiliki basis muslim seperti Kabul. Liakhovsky (2000) menyebut bahwa pembentukan kamp-kamp untuk menahan para oposan dari pemerintahan komunis menjadi sebuah kekeliruan yang terlihat memberi kerugian tersendiri bagi Uni Soviet dan PDPA itu sendiri (90).

Konflik selama lebih dari tiga dekade yang terjadi di Afganistan menjadi sumber keprihatinan dunia. Laporan Oxfam International menyoroti bahwa konflik berkepanjangan telah merampas hak-hak hidup orang Afganistan baik dari segi kehilangan properti hingga terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari keselamatan. Tiga belas persen populasi dilaporkan pernah atau sedang mengalami penahanan tanpa proses peradilan dan

21% populasi mengalami kekerasan fisik khususnya penyiksaan. Dalam hal ini, komunitas internasional baru sampai sebatas memberikan bantuan-bantuan (*aid*) namun dinilai tidak banyak mengubah keadaan. Fakta bahwa pada tiap-tiap periode konflik selalu terjadi penindasan oleh kelompok pemenang terhadap kelompok yang dianggap berseberangan dengan mereka merupakan inti dari penderitaan yang tidak pernah selesai. Selain itu perang juga membatasi akses penduduk terhadap layanan dasar sehingga menurunkan kualitas hidup secara signifikan (Jackson, *et. al.*, 2009). Perspektif kerugian akibat konflik merupakan pandangan baru yang lebih humanistik dalam melihat konflik Afghanistan tidak semata-mata dari kacamata ilmu politik atau strategis militer belaka.

Keragaman dari perkembangan historiografi yang ada sebenarnya disesuaikan dengan konteks sudut pandang penulisnya. Untuk memahami permasalahan yang terjadi di Afghanistan pada masa Perang Dingin perlu menelaah lebih dalam terkait dengan perkembangan historiografi. Tetapi perlunya dekonstruksi di dalam praktiknya untuk menyetarakan narasi-narasi yang berkembang, sehingga tidak terpaku terhadap realitas teks-teks yang telah tersedia. Hayden White (1980) menyatakan bahwa hakikat sebuah narasi dan naratif harus dipertimbangkan dengan baik, sehingga penyusunannya menjadi sebuah landasan pertimbangan yang matang dalam rekonstruksi sejarah (10).

Henner Fürtig menjelaskan lebih lanjut tentang perseteruan antara Islam dengan komunisme di Afghanistan. Tidak lain adalah peran Amerika Serikat untuk meruntuhkan pengaruh Uni Soviet dan komunisnya, sehingga dengan terpecahnya Blok Timur menjadi dua, yaitu kubu Uni Soviet dan kubu Tiongkok menjadikan lemahnya pengaruh komunisme di Afghanistan. Tentu saja, dengan adanya Perang Teluk yang terjadi antara Iran dan Irak sehingga membuat kekacauan politik di tingkat internasional dan ketidakseimbangan harga minyak dunia lebih tertuju pada penyelesaian kedua negara tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat dapat mengintervensi secara kuat di wilayah Afghanistan, kemudian isu yang dimainkan adalah anti-Syiah yang sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat. Pada tahun 1990an, kelompok Syiah yang mendapat perlindungan dari Uni Soviet justru mendapat penentangan secara keras dari kelompok Taliban di bawah komando Mullah Omar (Fürtig, 2014).

C. Penulisan Ulang Sejarah Afghanistan

Sejarah tidak hanya sekadar pengkajian tentang perubahan konteks waktu, melainkan tentang adanya transformasi yang mengkaji lebih jauh mengenai informasi atau ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh sejarawan atau penulis-penulis pada masa lampau secara naratif (Purwanto, 2006). Pentingnya untuk menarasikan ulang peristiwa sejarah adalah bentuk keterbukaan disiplin sejarah terhadap pembaruan-pembaruan. Sejarah harus ditulis berdasarkan sumber-sumber yang ada dan dengan interpretasi yang sesuai, sehingga dalam runutan berbagai peristiwa sejarah, tidak mengedepankan ideologi yang sama agar tulisan sejarah menjadi relatif seimbang. Sejarah tentang Afghanistan adalah sebuah proyek politik yang berambisi untuk mencari dukungan terhadap legalitas sejarah, sehingga hegemoni yang dilakukan oleh Uni Soviet atas wilayah Afghanistan adalah murni kepentingan politik (Nadir, 2013). Hal ini bukanlah untuk pelurusan sejarah, melainkan memberikan varian baru dalam sebuah tulisan sejarah yang makin beragam. Tentu saja ini bukan pembuktian pencarian

kebenaran, tetapi pembaruan-pembaruan dalam sebuah tulisan sejarah, sehingga terdapat adanya fakta-fakta baru dalam historiografi.

Dalam aspek historiografi, Nasreen Akhtar (2008) dalam artikelnya ia menjelaskan bahwa dalam konteks spasial, Afganistan dan Pakistan adalah dua negara yang memiliki hubungan dekat dengan Asia Selatan (50). Selain itu, memasuki tahun 1996, Taliban mendominasi sistem politik dan pemerintahan di Afganistan, sehingga Taliban kerap kali mengambil sikap untuk berkonfrontasi dengan Barat dan Israel. Sikap konfrontasi tersebut akhirnya membuat pihak Barat seperti Amerika Serikat mengadakan invasi untuk melakukan kudeta terhadap kekuasaan Taliban. Pergeseran arah politik yang terjadi selama masa kuasa Taliban menjadikan Afganistan kerap berseberangan dengan Israel dan mendukung propaganda dari Saddam Husein di Irak. Selain itu, Nasreen Akhtar juga menyoroti bahwa Taliban adalah kelompok puritan dan etnis yang membawa ideologi agama dengan dukungan dari suku Afghan asli.

Kekuasaan Taliban juga kerap menyingkirkan kepentingan hak-hak perempuan, sehingga kebebasan tidak lagi didapat oleh mereka. Seran de Leede (2014) menyoroti tentang penerapan hukum Islam yang akhirnya meminggirkan aktivitas perempuan di berbagai bidang (342). Tentu saja, hal ini kontras apabila dilihat ke masa pendudukan Uni Soviet pada pertengahan 1970-1980an, yang memberikan ruang cukup besar bagi perempuan dan menyetakannya dengan kedudukan laki-laki. Bentuk dari kesetaraan tersebut nyatanya sirna setelah Taliban benar-benar menancapkan visi kuasa politiknya ke dalam pemerintahan.

Ketidakberpihakan terhadap kelompok perempuan semasa kekuasaan Taliban kerap mendapatkan kritik dari berbagai negara di dunia. Hal ini sulit dipahami, termasuk Arab Saudi yang juga menerapkan kebijakan yang sama. Atas dasar itulah, Afganistan di bawah kepemimpinan Taliban benar-benar mengerdikan hak-hak perempuan. Puncaknya adalah pada tahun 1999, saat kelompok Feminis yang dimotori oleh Jay dan Mavis Leno mendapat dukungan penuh dari Kathy Bates, Sidney Potier dan Lily Tomlin mulai membawa kasus tersebut ke ranah internasional dan mempublikasikannya ke dalam Majalah George. Akan tetapi, aksi tersebut justru mendapat perlawanan juga dari kelompok penentang kesetaraan gender di Afganistan seperti Mellissa Etheridge, Wyonna Judd, dan Sarah McLachlan yang mengampanyekan "*we are with you*" menjadi satu diskursus menarik dalam peristiwa tersebut (Hirsckind dan Mahmood, 2002).

Selain itu, sebagai negara yang mayoritas Islamnya beraliran Sunni, terjadi peminggiran terhadap kelompok Syiah yang dianggap sebagai pendukung Iran dan Ayyatullah Khomeini (Leede, 2014). Perbedaan pandangan dalam beragama di Afganistan menjadi satu hal yang cukup rumit untuk dipahami. Meskipun dalam berbagai kesempatan ketidaksesuaian dalam beragama menjadi hal yang fitrah, namun di Afganistan justru mendapatkan ancaman yang tidak dapat ditolerir oleh kelompok Taliban. Dalam konteks penulisan ulang narasi sejarah Afganistan, maka rancangan institusi konvensional yang justru menolak pembaruan masuk ke dalam satu negara berakibat pada terjadinya keruntuhan di dalamnya. Aviezer Tucker (2001) dalam artikelnya menarasikan bahwa dukungan ilmu pengetahuan seperti filsafat, sejarah, ilmu sosial dan politik, sains serta hukum tata negara adalah satu peran yang cukup penting dalam

mendukung pendidikan di satu negara, sehingga melalui ilmu pengetahuan tersebut instansi pendidikan menjadi hal yang utama di dalam keterbukaan berpikir bagi masyarakat (40).

Kondisi Afganistan tentu tidak jauh lebih baik saat berada di bawah kekuasaan Taliban yang memandang bahwa Islam adalah jalan satu-satunya untuk mencapai ambisi politik kelompoknya. Pada awal kemunculannya, komunis adalah musuh bersama yang harus disingkirkan dari panggung politik internasional dan juga dukungan pihak Barat yang tengah berseteru dengan Blok Timur justru berlomba-lomba mencari dukungan penuh di negara-negara netral seperti Afganistan. Taliban memang memanfaatkan momentum berupa mundurnya Uni Soviet dan situasi instabilitas pascaperang (invasi Amerika Serikat) untuk meraih kekuasaan dengan cara perebutan.

Sangat wajar apabila persinggungan antara Islam dan komunis sampai dewasa ini masih menjadi isu yang menarik untuk dibahas dan juga kalahnya komunis pada akhir Perang Dingin menandakan ketersingkirannya dari historiografi atau panggung sejarah, sehingga komunis diidentikkan sebagai musuh bersama. Dalam wacana panggung sejarah memang kerap kali meninggikan pemenang kontestasi dalam historiografi. Namun, dalam mazhab *Annales*, pandangan terhadap orang-orang atau kelompok yang kalah kontestasi menjadi satu nuansa baru di dalam historiografi yang dipelopori oleh March Bloch, Febvre dan Braudel sebagai gaya baru dalam penulisan sejarah (Huppert, 1978). Nina Lubis (2000) juga menjelaskan bahwa penulisan sejarah di setiap perkembangannya, mengalami ciri khasnya masing-masing, sehingga memengaruhi coraknya yang beragam (10). Terlepas daripada itu, Nina Lubis juga menambahkan bahwa konsepsi yang ditawarkan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya juga menjadikan tulisan ini semakin beragam.

Begitu pula dalam perekonstruksian historiografi Afganistan, keberagaman tersebut menyebabkan banyaknya pandangan-pandangan tentang narasi yang hadir menjadi wacana menarik di dalamnya. Nasreen Akhtar (2008) juga menjelaskan lagi tentang sisi lain Taliban dalam perbandingannya dengan kedudukan Uni Soviet saat menguasai Afganistan. Kedua rezim tersebut terlihat cukup kontras dan menonjolkan kekuatan politiknya masing-masing, tetapi dalam sisi yang berbeda, Uni Soviet mampu menunjukkan model kehidupan yang berbeda dan fakta yang berkebalikan dibanding kebanyakan historiografi yang bermunculan (56).

Sejak awal invasinya di wilayah tersebut pada tahun 1979, Uni Soviet justru menjadikan Afganistan memiliki hubungan baik dengan Pakistan, terutama saat rezim Najibullah yang merupakan pendukung marxisme di Afganistan (Akhtar, 2008). Justru kondisi berbeda terjadi saat Taliban benar-benar memegang kendali pemerintahan di Afganistan mulai tahun 1996. Munculnya istilah “Talibanisasi” merupakan embrio dari peristiwa 2001 yang mengakibatkan Islam dalam terminologi Barat menjadi kelompok yang radikal dan ekstremis. Lebih jauh lagi, kerusuhan yang terjadi di Afganistan setelah Taliban berkuasa dan berujung pada kudeta tahun 2001, juga diakibatkan oleh krisis ekonomi yang membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap rezim tersebut. Terlebih, konfrontasi dengan beberapa negara lain mengakibatkan Taliban membawa keterpurukan ekonomi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (Rashid, 1999).

Pascakudeta yang terjadi di Afganistan pada 2001, membuat mentalitas dan psikologi umat Islam di seluruh dunia mengalami dampak yang cukup negatif, pascabubaranya Turki Usmani pada 1924. Bagi negara-negara Barat, Afganistan merupakan penyedia sumber energi dalam hal ini minyak bumi. Keberadaan sumber minyak yang dikuasai kelompok yang tidak suka dengan Barat menjadikan penguasa saat itu harus digantikan, dalam perspektif Amerika. Sebab, Taliban mendapatkan bantuan cukup kuat dari Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya yang memilih konfrontasi dengan Israel. Permasalahannya adalah pengaruh politik dan ekonomi yang dijanjikan terhadap kelompok oposisi, harus sesuai dengan hasil yang didapat (Dobbins dan Malkasian, 2015).

Di samping faktor sumber daya energi, dukungan kemanusiaan untuk terbebas dari jeratan politik Taliban, seperti kelompok perempuan juga mulai menggema dan menjadi salah satu alat legitimasi bagi intervensi Amerika dan negara-negara Barat. Gagasan kebebasan mulai disuarakan dan keterbukaan atas informasi menjadi isu penting di dalam beberapa demonstrasi yang berujung pada kudeta tahun 2001. Diskursus tentang perdamaian dan kebebasan berbicara menjadi aspirasi utama yang dibawa oleh kelompok demonstran. Dobbins dan Malkasian (2015) juga memberi argumen bahwa kepemimpinan Taliban yang mengatasnamakan Islam sebagai tujuan politik pada akhirnya menjadi bom waktu yang menghancurkan kepemimpinannya. Selain itu, pemahaman untuk perdamaian dilakukan oleh kelompok pembaharu seperti Deobandism justru memanfaatkan situasi yang sangat keruh dengan membawa lagi isu agama di dalam tujuan politiknya (57). Sima Samar (2019) dalam artikelnya juga memimpikan kehidupan para wanita jika Taliban berhasil dikudeta akan membawa perubahan besar dan mengembalikan marwah kemanusiaan dan wanita seperti sebelum Afganistan berada di bawah Taliban (150).

Perseteruan Islam dan Komunisme di Afganistan memang mengalami perbedaan politik yang cukup terlihat, terlebih Islam yang saat itu direpresentasikan oleh kelompok Taliban sebagai bagian dari oposisi komunisme di Afganistan, tentu saja berbalik menyerang kepentingan Barat di Afganistan dan beberapa negara Islam lainnya, sehingga kondisi tersebut tidak lebih buruk dari sebelumnya. *Counter-attack* yang akhirnya membuat Taliban akhirnya jatuh dalam kudeta menyebabkan serangan-serangan terhadap lawan politiknya, tentunya di luar negeri, saat pesawat yang menabrak Gedung World Trade Centre (WTC) pada 2001 semakin menunjukkan skeptisisme orang-orang Barat terhadap teror yang dinilai menunjukkan adanya hubungan antara kelompok radikalisme dan Islam (Lange, 2003).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam wacana manapun, Taliban menjadi satu diskusi penting dalam peristiwa sejarah. Tentunya mereka sangat menguatkan posisi kelompok-kelompok Islam yang menginginkan berdirinya khilafah menjadi sangat sentral. Fase tersebut, tentu telah selesai dan setelah Taliban dikudeta, Afganistan masih menghadapi beberapa kelompok oposisi. Akan tetapi, selama Taliban berkuasa penuh selama lima tahun, perubahan Afganistan yang sebelumnya di bawah kuasa Uni Soviet selalu memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat, menjadi kontras saat Taliban

berkuasa di Afganistan. Beberapa kejahatan yang dilakukan rezim Taliban mungkin sempat terlewat dalam pembahasan sejarah adalah karena kedekatan emosional penulisan sejarah oleh sejarawan muslim yang cenderung berseberangan dengan paham komunisme.

Sejatinya, dalam historiografi memang kerap ditemukan beberapa kepentingan yang menjadikan Taliban superior dan ada juga yang menjadikannya sebagai kelompok yang kalah dalam kontestasi. Pendekatan politik merupakan salah satu varian yang cukup penting dalam merekonstruksi narasi yang berkembang. Selain itu, dekonstruksi adalah satu kunci yang cukup penting dalam mengkaji lagi tema-tema historiografi, terutama dalam unsur penulis dan karyanya yang lebih beragam, sehingga adanya pembaruan-pembaruan di dalam teks yang dapat menghadirkan narasi-narasi berbeda dari sebelumnya dan perluasan pandangan di dalam keberlangsungan pengetahuan akan historiografi menjadi lebih besar.

Taliban memang telah banyak ditulis oleh kebanyakan orang dan kecondongan untuk membenaran terkait apa yang dilakukan oleh Taliban menyatakan bahwa sudah sepatutnya penulisan sejarah menjadi penilaian terhadap keadaan yang tidak mengatasnamakan benar atau salah dan tentunya menjadi satu bahan renungan di dalam keselarasan berpikir untuk menyikapi berbagai perbedaan pandangan, tetapi historiografi kerap dijadikan sebagai ajang tarung politik dalam memperebutkan legitimasinya dan panggung sejarah adalah salah satu yang paling terlihat di dalam usaha-usaha dalam mengadakan kontestasi tersebut.

Penulisan ulang sejarah Afganistan dalam perspektif modern sebaiknya tidak terbatas pada kronologi konflik dan keterlibatan pihak-pihak di dalamnya. Namun lebih dari itu sudah saatnya historiografi memberi ruang kepada korban konflik yang selama ini “terbungkam” dan tertindas serta mereka yang sampai harus terlunta-lunta meninggalkan negerinya. Bagaimanapun, para korban sesungguhnya merupakan aktor sejarah yang dapat berperan untuk mewujudkan kembali cita-cita kehidupan yang damai dan aman. Perspektif para korban konflik akan menghadirkan wawasan baru dalam melihat Afganistan maupun menggugah empati dunia terhadap praktik-praktik kekerasan, penjajahan, dan perampasan hak hidup yang masih terus terjadi dengan tabir alasan-alasan politik dan isu keamanan.

B. Saran

Rekonstruksi historiografi Afganistan menjadi sebuah tantangan bagi para sejarawan atas pembaruan-pembaruan disiplin untuk menghadirkan humanisme dalam narasinya. Fakta peristiwa yang mulai terpadu dengan agenda-agenda politik komunis dan Islam di Afganistan menjadi persoalan tendensius dalam substansi kesejarahan. Secara teoritis, diharapkan bahwa sejarawan menulis politik Afganistan dapat memahami fakta terbaru khususnya berkaitan dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kebebasan berpolitik, penguatan hak-hak wanita untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja, kemandirian ekonomi, serta tidak kalah penting adalah bagaimana Islam membentuk Afganistan dalam menghadapi berbagai isu modern alih-alih pandangan konservatif menjadikan negara ini mengalami stagnasi dalam percaturan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, N. (2008). Pakistan, Afganistan, and The Taliban. *International Journal on World Peace*, 25 (4), 49-73.
- Ankersmit, F.R. (1987). *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Azzam, A. (1986). *Perang Afganistan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dobbins, J. dan Carter M. (2015). Time to Negotiate in Afganistan: How to Talk to the Taliban. *Foreign Affairs*, 94 (4), 53-64.
- Formichi, C. (2015). (Re) Writing the History of Political Islam in Indonesia. *Sojourn*, 30 (1), 105-140.
- Fürtig, H. (2014). Afganistan in the Foreign Policies of Middle Eastern Countries. *Asian Perspective*. 38 (4), 541-516. <https://www.jstor.org/stable/43738106>.
- Gompert, D., et.al. (2014). *Blinders, Blunders, and Wars*. California: Rand Corporation.
- Halimi, M. Bin Haji, et.al. (2022). Radical Ideological Narratives Following the Taliban's Takeover of Afganistan. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 14 (1), 121-125.
- Hirschkind, C. dan Mahmood, S. (2002). Feminism, Taliban and the Politics of Counter-Insurgency. *Anthropological Quarterly*, 75 (2), 339-354.
- Huppert, G. (1978). The Annales School Before the Annales [with discussion]. *Fernand Braudel Center*, 1 (3), 215-224.
- Jacobs, M.F. (2006). The Perils and Promise of Islam: The United States and the Muslim Middle East in the Early Cold War. *Diplomatic History*, 30 (4), 705-739.
- Jackson, A. (2009). *The Cost of War: Afghan Experiences of Conflicts, 1978-2009*. Nairobi: Oxfam International.
- Kartodirdjo, S. (2017). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Khan, K. N. (1990). Soviet Interests in Afganistan and Implications Upon Withdrawal. *Thesis to U.S. Army Command and General Staff College*. Kansas: Fort Leavenworth.
- Kleinberg, E. (2007). *Haunting History: For a Deconstructive Approach to the Past*. Stanford: Stanford University Press.
- Kuntowijoyo. (2003). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Lange, J.H. (2003). Health Effect of Local Residents Near the World Trade Center: Have They Been Forgotten?. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*. 45 (5), 465-466.
- Leede, S. (2014). Afghan Women and the Taliban: An Exploratory Assessment. *International Centre for Counter-Terrorism*, 5 (1), 1-13.
- Lewis, B. (1954). Communism and Islam. *International Affairs*, 30 (1), 1-12.

- Liakhovsky, A. (2000). The Civil War in Afganistan. *National Security and the Future*, 1 (1), 185-212. <https://hrcak.srce.hr/18412>
- Lubis, N. (2000). *Historiografi Barat*. Bandung: Satya Historika.
- Machmudi, Y. (2021). *Era Baru Afganistan: Invasi Barat hingga Kemenangan Taliban*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nadir, L.C. (2013). Cold War. *The North American Review*, 298 (3), 3-5. <https://www.jstor.org/stable/24416597>
- Near Eastern and South Asian (NESA) Analys. (1984). Afganistan: Resisting Sovietization. *Research Paper Directorate of Intelligence, Central Intelligence Agency*.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Quddus, M.A. (1991). *Bersama Mujahidin*. Terjemahan Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rashid, A. (1999). The Taliban: Exporting Extremism. *Foreign Affairs*, 78 (6), 22-35.
- Samar, S. (2019). Feminism, Peace and Afganistan. *Journal of International Affairs*, 72 (2), 145-158.
- Shahab, A.H. (1987). *Perang Afganistan: Ekspansi Rusia ke Asia-Pasifik*. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.
- Tucker, A. (2001). The Future of the Philosophy of Historiography. *History and Theory*, 40 (1), 37-56.
- Väyryren, R. (1980). Afganistan. *Journal of Peace Research*, 17 (2), 93-102.
- White, H. (1980). The Value of Narrativity in the Representation of Reality. *Critical Inquiry*, 7 (1), 5-27. DOI 10.1086/448086.